

Implementasi Penyajian Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP Pada Koperasi di kota Palembang

Efva Octavina Donata Gozali^a, Nilam Kesuma^b

^a Universitas Sriwijaya, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Indonesia. Email: efvagozali@unsri.ac.id

^b Universitas Sriwijaya, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Indonesia. Email: nice_palembang@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian – This study has two main objectives; first, to investigate the implementation of SAK-ETAP based financial statements on cooperatives, second, to observe the constraints faced by cooperatives in implementing SAK-ETAP in the preparation of financial statements.

Desain/Methodologi/Pendekatan – The analytical technique used in this research is qualitative which is descriptive comparative, means comparing the accounting treatment applied by the cooperatives with SAK-ETAP.

Temuan – The results of this study indicate that SAK-ETAP has not been fully implemented in the preparation of the financial statements, from the 33 cooperatives as objects of this research, only 3 cooperatives have prepared the comprehensive financial statements.

Keterbatasan penelitian – Tuliskan secara singkat apa yang menjadi keterbatasan pada penelitian ini, ini yang dapat menjadi pintu masuk penelitian berikutnya.

Originality/value – The constraints faced by cooperatives are caused by limited human resources and lack understanding of the implementation of SAK-ETAP.

Keywords: Cooperatives Accounting, Cooperatives, SAK ETAP

PENDAHULUAN

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi, tuntutan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara profesional akan semakin besar. Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan, untuk pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian koperasi. Salah satu upaya tersebut adalah pengembangan dari sistem informasi yang diperlukan untuk menumbuhkan koperasi melalui akuntansi, khususnya dalam penyusunan laporan keuangannya.

Laporan keuangan adalah tolok ukur dalam menilai kesehatan perusahaan. Tujuan laporan keuangan menurut SAK ETAP (IAI, 2013) adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun eksternal. Pihak internal yang dimaksud terbagi menjadi 3, yaitu manajemen, pemegang saham atau investor, dan karyawan. Sedangkan pihak eksternal merupakan kreditor dan pemerintah.

Melihat pentingnya laporan keuangan dalam menilai kesehatan usaha, maka laporan keuangan harus disusun secara cermat dan terbebas dari bias. Laporan keuangan harus dapat diinterpretasikan oleh para pihak yang memiliki kepentingan (*related party*) dengan persepsi yang sama. Untuk itu perlu adanya suatu standar akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan suatu badan usaha. Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia terdiri atas 4 pilar yaitu Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, SAK ETAP, SAK Syariah, dan Standar Akuntansi Pemerintah. SAK umum diperuntukkan bagi perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik. Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi, SAK Umum cukup sulit penerapannya bagi pelaporan keuangan UMKM dan Koperasi. Pelaku UMKM dan Koperasi

umumnya hanya memiliki pengetahuan akuntansi yang minim dan masih menerapkan akuntansi sederhana pada pencatatan dan penyajian laporan keuangan usaha.

Standar Akuntansi Keuangan ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 19 Mei 2009. SAK ETAP diperuntukkan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Koperasi termasuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. SAK ETAP memberikan banyak kemudahan bagi Koperasi dibandingkan dengan SAK Umum yang memiliki ketentuan pelaporan yang lebih kompleks.

Walaupun dengan adanya SAK ETAP untuk mempermudah koperasi dalam melakukan pencatatan keuangan, tapi dalam implementasinya pencatatan keuangan yang dilakukan oleh sejumlah koperasi masih jauh dari standar yang ditetapkan. Melihat banyaknya koperasi yang belum bisa menyusun laporan keuangan yang sesuai standar, maka menarik untuk diteliti mengenai implementasi penyajian laporan keuangan berbasis SAK ETAP pada koperasi di kota Palembang. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penyajian laporan keuangan koperasi yang berbasis SAK ETAP di kota Palembang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi koperasi dalam penerapan SAK ETAP?

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian, Karakteristik dan Jenis Koperasi

Menurut UU No 17 Tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda atau *the dual identity of the member*, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna koperasi (*user own orsented firm*).

Tujuan koperasi tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2012 tentang kekoperasian, pada BAB II Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan koperasi adalah:

“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”

SAK ETAP

Salah satu perbedaan dasar antara SAK Umum dengan SAK ETAP adalah komponen laporan keuangan yang terdapat di dalamnya. SAK ETAP masih menggunakan istilah Neraca. Sedangkan pada SAK Umum, Neraca berganti nama menjadi Laporan Posisi Keuangan. Selain itu, pada SAK ETAP hanya menggunakan Laporan Laba Rugi. Sedangkan pada SAK Umum selain menggunakan Laporan Laba Rugi juga menggunakan Laporan Laba Rugi Komprehensif. Untuk Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, baik SAK ETAP maupun SAK Umum sama-sama menggunakan ketiga laporan ini.

SAK ETAP adalah Standar akuntansi keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. ETAP yaitu Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK ETAP dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setiap perusahaan memiliki prinsip *going concern* yakni menginginkan usahanya terus berkembang. Standar ETAP ini disusun cukup sederhana sehingga tidak akan menyulitkan bagi penggunanya yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yang mayoritas adalah perusahaan yang tergolong usaha kecil dan menengah, dan koperasi.

Akuntansi Koperasi

Akuntansi koperasi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan dan penafsiran laporan keuangan koperasi dalam satu periode tertentu. Periode tersebut mungkin bulanan, tiga bulanan, enam bulanan atau tahunan. Biasanya periode pelaporan di koperasi adalah satu tahun. Laporan keuangan koperasi sebagai bagian dari akuntansi dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi keuangan koperasi pada pihak-pihak tertentu baik intern maupun ekstern. Pihak intern koperasi adalah para anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan. Sedangkan pihak ekstern adalah calon anggota, pemerintah, gerakan koperasi, auditor, dan sebagainya.

Standar Akuntansi Koperasi

Awalnya, pedoman dalam standar akuntansi koperasi menggunakan PSAK 27. Di dalam PSAK 27 mengatur sistem akuntansi atas transaksi yang meliputi transaksi setoran anggota koperasi, transaksi usaha koperasi dengan anggotanya, transaksi yang spesifik pada koperasi dan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Namun, pada 23 Oktober 2010, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengeluarkan *Exposure Draft* Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) No. 8 terkait PSAK 27 yang membahas akuntansi koperasi sehingga pernyataan ini berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. PPSAK No. 8 menyebutkan bahwa pencabutan PSAK 27 adalah dampak dari konvergensi ke standar akuntansi internasional (*International Financial Reporting Standard atau IFRS*) yang mengakibatkan perlunya pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk suatu industri tertentu. Hal ini dikarenakan pengaturan akuntansi secara prinsip sudah ada dalam SAK yang mengacu ke IFRS.

PPSAK 8 lebih lanjut menyatakan, dengan dikeluarkannya pernyataan pencabutan ini, entitas menerapkan SAK lain, yang prinsip di dalamnya menggantikan prinsip-prinsip PSAK 27. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif.

Pada jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIV (Veronica, S., & Rudiantoro, R, 2011) menyebutkan bahwa lahirnya SAK ETAP dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan SAK khusus untuk UKM agar bisa memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan dan dapat memberikan informasi akuntansi terkait kondisi usahanya sehingga pengusaha UKM dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit berupa laporan keuangan, mengevaluasi kinerja, mengetahui posisi keuangan, menghitung pajak dan manfaat lainnya. Terkait dengan kondisi di atas, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah mensahkan Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP tersebut akan berlaku efektif per 1 Januari 2011 namun penerapan sebelum tanggal efektif diperbolehkan, yaitu untuk menyusun laporan keuangan pada atau setelah 1 Januari 2010.

Sebagai tambahan, Martani (2011) menyebutkan bahwa entitas yang dikategorikan sebagai Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) dapat memilih tetap menggunakan PSAK – IFRS atau menggunakan SAK ETAP. ETAP yang tetap memilih menggunakan PSAK – IFRS tidak boleh dikemudian hari berubah menggunakan SAK ETAP. Entitas dengan akuntabilitas publik yang kemudian telah memenuhi persyaratan sebagai ETAP dapat menggunakan SAK ETAP.

Jenis Laporan Keuangan Koperasi

Menurut Rudianto (2010: 5) laporan keuangan koperasi terdiri dari:

- a. Perhitungan Hasil Usaha adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Laporan hasil usaha harus merinci hasil usaha yang berasal dari anggota dan laba yang diperoleh dari aktifitas koperasi dengan bukan anggota.
- b. Neraca adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumberdaya yang di miliki koperasi, serta informasi dari mana sumberdaya tersebut diperoleh.
- c. Laporan arus kas adalah suatu laporan mengenai arus kas keluar dan arus kas masuk selama suatu priode tertentu, yang mencakup saldo awal kas, sumber penerimaan kas, sumber pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada suatu priode.

- d. Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang menunjukkan manfaat ekonomi yang diterima anggota koperasi selama suatu periode tertentu. Laporan tersebut mencakup empat unsur, yaitu:
1. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.
 2. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama.
 3. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.
 4. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Laporan Keuangan

SAK ETAP paragraf 2.24 menjelaskan bahwa pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Lebih lanjut dalam paragraf 2.28-2.29 menyebutkan bahwa suatu pos yang pada saat tertentu tidak dapat memenuhi kriteria pengakuan dapat memenuhi syarat untuk diakui di masa depan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian. Dan suatu pos yang gagal memenuhi kriteria pengakuan tetap perlu diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan atau skedul tambahan.

Pada saat menyusun laporan keuangan, SAK ETAP dalam paragraf 2.33 mengharuskan entitas untuk menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, dan ekuitas, penghasilan dan beban (unsur-unsur laporan keuangan). SAK ETAP paragraf 2.30 – 2.31 mendefinisikan bahwa pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang umum digunakan adalah biaya historis dan nilai wajar. SAK ETAP dalam paragraf 3.2-3.4 menyebutkan bahwa laporan keuangan menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas secara wajar dan harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP bahwa entitasnya mengikuti SAK ETAP.

Lebih lanjut dalam paragraf 3.6-3.7 SAK ETAP menyebutkan bahwa penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali terdapat perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau SAK ETAP mensyaratkan adanya suatu perubahan.

Teori Agensi

Menurut Jensen (1976), Teori agensi adalah sebuah teori yang menjelaskan hubungan antara *agent* dan *principal*. Jika dikaitkan pada entitas bisnis koperasi, maka pihak prinsipal pada koperasi adalah para anggota koperasi dan pihak lain yang memberikan bantuan permodalan pada koperasi, seperti pihak perbankan dan pemerintah sedangkan pihak agen pada koperasi adalah pengurus koperasi. Teori ini akan digunakan untuk membantu pemaparan penjelasan mengenai tingkat seberapa jauh penerapan SAK ETAP pada koperasi

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Hartono (2009) Penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan keadaan sebenarnya. Peneliti memilih analisis menggunakan metode ini karena peneliti ingin memberikan gambaran mengenai implementasi SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan pada koperasi di Palembang.

Metode Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah koperasi yang ada di kota Palembang yang terdaftar pada Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Kota Palembang. Sampel dari penelitian ini adalah

koperasi karyawan. Menurut Kementerian Koperasi, koperasi karyawan adalah sebuah koperasi yang berada di sebuah perusahaan tertentu. Anggota koperasi ini adalah para karyawan dari perusahaan tersebut, koperasi karyawan haruslah memiliki badan hukum dan terdaftar karena para anggota dan pengurusnya sudah dewasa dan paham mengenai hukum.

Berdasarkan data yang terdaftar di Dinas Koperasi Kota Palembang, jumlah koperasi karyawan yang telah menjalankan RAT sebanyak 34 koperasi. Berikut disajikan data koperasi yang telah menjalankan RAT tahun terakhir 2015 pada Tabel 1. Adapun dasar pemilihan sampel yaitu dengan *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut :

1. Koperasi tersebut terdaftar di Dinas Koperasi Kota Palembang, yang artinya telah memiliki sertifikat NIK.
2. Koperasi tersebut masih aktif .
3. Koperasi tersebut telah menjalankan RAT tahun 2015.

Tabel 1: Data Koperasi yang Melaksanakan RAT 2015 (Per 31 Juni 2016)

No	Kelompok Koperasi	Jumlah
1	KPRI	37
2	Koperasi Karyawan	34
3	KSP/KOPDIT	8
4	Primer Koperasi AS/AL/AU/Pol	21
5	Koperasi Serba Usaha (KSU)	3
6	Koperasi Wanita	6
7	Koperasi BMT	3
8	Koperasi Lain-lain	8
Jumlah		120

Sumber : <http://kementeriankoperasi.com>

Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2010) terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan, diantaranya adalah dengan observasi (pengamatan), dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan kuisioner.

1. Dokumentasi

Sugiyono (2010) menyatakan bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dalam penelitian ini dapat berupa pencatatan dan penilaian transaksi keuangan pada koperasi, RAT koperasi tahun buku 2015. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode kuisioner.

2. Disclosure Quality (Kualitas Pengungkapan)

Menurut Sunarto (2003), kualitas pengungkapan laporan keuangan dihitung berdasarkan indeks pengungkapan laporan keuangan. Indeks pengungkapan yang digunakan didasarkan atas informasi yang tersedia dalam penyajian laporan tahunan. Di Indonesia, pengungkapan dalam laporan keuangan baik yang bersifat wajib maupun sukarela telah diatur dalam PSAK No.1

Disclosure Quality adalah suatu cara dalam mengukur kualitas pengungkapan informasi, digunakan kuisioner yang berisi checklist mengenai item-item yang diungkapkan oleh koperasi. Dalam penelitian ini akan menggunakan 42 pertanyaan yang dibagi menjadi tiga kelompok yaitu 7 pertanyaan tentang pencatatan, 25 pertanyaan tentang penilaian dan 10 pertanyaan mengenai pelaporan. Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui kondisi terkini dari dalam implementasi SAK dalam penyusunan laporan keuangan pada koperasi di kota Palembang. Implementasi SAK ETAP memang belum sepenuhnya dilakukan oleh koperasi karyawan yang ada di Kota Palembang. Daftar pertanyaan digunakan juga untuk mengetahui sejauh mana sampel penelitian telah membuat laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dimana penulis langsung memperoleh data dari koperasi berupa pencatatan dan penilaian transaksi keuangan, pencatatan dan penilaian perolehan dan penyusutan aset, dan penyajian pelaporan keuangan.

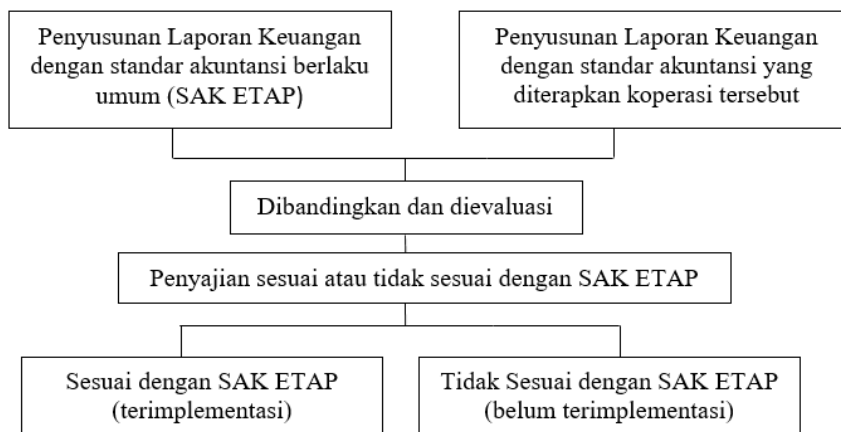
Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yang bersifat deskriptif komparatif, yaitu dengan cara membandingkan perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh koperasi dengan SAK ETAP. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah :

1. Melakukan wawancara dan dokumentasi
2. Mengevaluasi hasil wawancara serta data yang didapat dari dokumentasi, kemudian membandingkannya dengan teori-teori yang diperoleh dari literatur.
3. Menyimpulkan hasil penelitian evaluasi SAK ETAP pada laporan keuangan koperasi.

Kerangka Berfikir

Figur 1: Kerangka berfikir Implementasi Penyajian Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah Koperasi Karyawan yang terdapat di kota Palembang. Adapun jumlah koperasi karyawan menurut dinas koperasi kota Palembang adalah 34 Koperasi Karyawan, dan masing-masing Koperasi diberikan 2 buah kuesioner yang harus diisi oleh Ketua dan Bendahara dari Koperasi. Dari 68 kuesioner yang diberikan, terdapat 59 responden yang mengembalikan kuesioner tersebut, yaitu terdiri dari 33 orang bendahara koperasi dan 26 orang ketua atau orang yang kompeten dalam pengambilan keputusan.

Analisis Data

Dewan Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik berfungsi untuk menyelaraskan pemakaian laporan keuangan yang diselenggarakan Koperasi. Namun, tidak semua Koperasi dapat menyelenggarakan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP. Koperasi karyawan yang terdapat di kota Palembang telah membuat laporan keuangan yang merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban koperasi selama satu periode. Dalam laporan pertanggungjawaban tersebut laporan keuangan yang disajikan adalah neraca, laporan hasil usaha, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas.

Analisis Pencatatan Transaksi Keuangan

Kegiatan dari koperasi karyawan yang ada di kota Palembang antara lain adalah simpan pinjam, konsumsi dan produksi. Dari data yang dihimpun sebagian koperasi mengaku membuat laporan keuangan tetapi yang dimaksud mereka laporan keuangan adalah kegiatan mencatat dengan menggunakan *singel entries*. Sedangkan menurut PSAK pencatatan harus dilakukan dengan metode *double entries*. Akibatnya bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

Pada praktek yang berjalan, dari 33 koperasi yang mengembalikan kuesioner hanya ada 3 koperasi yang menggunakan pencatatan berpasangan (*double entries*), dan sebanyak 30 lainnya menggunakan sistem pencatatan ini. Sistem pencatatan tersebut merupakan sebagian kecil dari akuntansi. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Akan tetapi, sistem ini juga memiliki kelemahan, antara lain kurang lengkap untuk pelaporan karena hanya dapat melaporkan saldo kas, dan tidak dapat melaporkan utang, piutang dan ekuitas dana. Juga sulit untuk melakukan kontrol transaksi, akibatnya sulit menelusuri kesalahan pembukuan yang terjadi.

Dari data yang dihimpun baik dari kuesioner yang diberikan ataupun wawancara kepada perwakilan pengurus koperasi yang ada pada bagian pertanyaan yang menggambarkan kurangnya pengetahuan pengurus koperasi atas pencatatan akuntansi yang sesuai dengan SAK ETAP, dapat dilihat bahwa sekitar atau sebanyak 30 koperasi tidak memiliki pencatatan akuntansi yang sesuai dengan SAK ETAP, 3 koperasi yang sudah menjalankan pencatatan yang baik sesuai SAK ETAP.

Berdasarkan pengamatan lewat Wawancara, sebagian besar Koperasi memang belum menggunakan SAK ETAP karena sebagian besar koperasi masih menggunakan catatan "*single entry*", dimana pencatatan atas transaksi kas dicatat di buku kas, transaksi piutang dicatat di Buku Piutang, dan transaksi utang di buku utang. Hal tersebut menunjukkan ternyata Sebagian Besar Koperasi Karyawan di Kota Palembang belum menyesuaikan laporan keuangannya dengan SAK ETAP, dengan alasan tidak mengetahuinya dan tidak memiliki sumber daya manusia akuntan yang mampu membuat laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP, namun terdapat beberapa koperasi yang sudah mengenal SAK ETAP dan menerapkannya dalam Pelaporan Keuangan Koperasinya dengan baik. Serta ada juga koperasi yang telah mengenal SAK ETAP tapi masih belum mampu untuk menerapkannya.

Jika dilihat dari pelaksanaan di lapangan dan jawaban yang diberikan pada kuesioner, sangat sedikit sekali koperasi yang menggunakan sistem pembukuan lengkap. Pencatatan yang biasanya dilakukan oleh koperasi yaitu :

1. Buku kas harian yaitu buku yang digunakan untuk mencatat semua aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran uang dalam kegiatan usaha.
2. Buku pembelian atau buku barang masuk yaitu buku yang digunakan untuk mencatat setiap kali ada pembelian barang baik secara tunai maupun secara kredit pada koperasi konsumsi.
3. Buku penjualan atau buku barang keluar. Sama halnya seperti buku pembelian, buku penjualan digunakan koerasi untuk mencatat penjualan baik ke anggota maupun non anggota secara tunai ataupun kredit.

Sebagian besar pengurus koperasi menyusun laporan keuangan dari ketiga buku tersebut.

Analisis Penilaian Transaksi Keuangan

Aset lancar yang dimiliki oleh koperasi terdiri dari kas ditangan, kas di bank, piutang, dan persediaan (untuk koperasi konsumsi). Aset lancar berupa kas ditangan diukur sebesar kas akhir yang ada pada brankas di koperasi setelah dikurangi pengeluaran yang terjadi selama periode itu. Aset ini diakui dan dicatat dalam neraca sebesar nilai kas akhir. Sedangkan kas di Bank diukur sebesar kas yang tertera dalam buku tabungan/rekening koran setelah dikurangi pengambilan untuk kepentingan biaya operasional dan beban administrasi ditambah pendapatan bunga. Kas di bank ini diakui dan dicatat dalam neraca sebagai aset lancar. Pengakuan atas aset lancar berupa kas dan kas di bank yang dilakukan oleh koperasi karyawan telah sesuai dengan SAK ETAP yang mensyaratkan aset lancar diakui sebesar kas akhir yang belum terpakai atau setelah ditambah pendapatan dan dikurangi beban selama periode itu, sehingga yang disajikan dalam neraca yaitu kas bersih. Akun piutang pada beberapa koperasi masih belum memisahkan antara piutang anggota dengan non anggota. Sedangkan menurut SAK-ETAP masing-masing piutang harus dibedakan misalnya antara piutang anggota dengan non anggota, piutang usaha, dan piutang lain-lain. Begitu pula untuk persediaan barang dagangan pada koperasi konsumsi, penilaian persediaan di neraca menggunakan harga jual sehingga menyebabkan nilai persediaan yang tidak wajar. Menurut SAK ETAP dicatat sebesar nilai perolehannya.

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi

penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) yang dihitung tiap akhir bulan. Namun ada beberapa koperasi tidak melakukan penyusutan atas aset tetap. Mereka menentukan nilai aset tetap ini dengan melihat harga pasar. Hutang yang dimiliki oleh koperasi karyawan terdiri dari hutang kepada anggota dan non anggota. Penyajian nilai hutang pada neraca berdasarkan kondisi sebenarnya. Hal ini telah sesuai dengan SAK ETAP yaitu penilaian atas hutang sesuai dengan nilai nominalnya. Namun ada beberapa koperasi yang belum memperinci utang anggota, utang non anggota dan utang lainnya.

Modal yang dimiliki oleh koperasi karyawan berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain-lain, cadangan dan SHU. Menurut SAK-ETAP dan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor.4/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi, ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang mempunyai karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha yang belum dibagi. Jika dilihat dari penilaian yang dilakukan oleh koperasi karyawan telah sesuai dengan SAK, hal ini dikarenakan juga diatur dalam pedoman akuntansi umum yang ditetapkan kementerian UMKM dan Koperasi.

Pendapatan koperasi diakui berdasarkan metode kas yaitu pendapatan tersebut diakui pada saat terjadinya pemabayaran atau kas diterima. Namun ada juga koperasi yang telah menggunakan metode akrual, yaitu mereka mengakui pendapatan pada saat terjadinya transaksi. Perhitungan hasil usaha itu sendiri pelayanan kepada anggota dan non anggota. Dalam hal pengelompokan atas pendapatan itu sendiri, pengurus koperasi yangtelah mengenal SAK ETAP membagi pendapatan tersebut tidak hanya dari anggota dan non anggota saja. Mereka juga mengelompokan pendapatan dari hasil operasional dan non operasional.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor.4/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi konsep beban operasional dalam laporan perhitungan hasil usaha merupakan gabungan antara beban usaha dan beban perkoperasian. Beban usaha terdiri dari beban-beban penjualan dan beban administrasi dan umum, sedangkan beban yang dikeluarkan untuk meningkatkan sumber daya para anggota dan pengembangan koperasi disebut dengan beban perkoperasian. Koperasi karyawan sebagian besar telah menerapkan pedoman pencatatan dan penilaian seperti ini, yaitu beban dikelompokan berdasarkan beban usaha dan beban perkoperasian dan beban tersebut dicatat sesuai dengan nilai yang dikeluarkan. Hal ini pun sesuai dengan ketentuan dalam SAK ETAP.

Analisis Penyajian Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian ada 3 koperasi yang menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dalam SAK ETAP, yaitu Koperasi Karyawan Semen Baturaja (KKS), Koperasi Karyawan Rukun, dan Koperasi Karyawan Handria Sanggraha. Koperasi karyawan yang lainnya membuat laporan keuangan hanya neraca dan laporan SHU. Hal ini dikarenakan kedua laporan tersebut harus mereka lampirkan dalam rapat anggota tahunan. Neraca yang mereka tampilkan pun hanya memperlihatkan kesimbangan antara sisi kanan dan sisi kiri. Sementara untuk komponen yang disajikan tidak sesuai dengan SAK ETAP. Misal pada sisi kiri yaitu pos aktiva/aset mereka menyajikan aset lancar dan aset tetap. Nilai yang dicantumkan pada aset lancar telah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP yaitu sebesar nilai nominalnya. Aset tetap mereka mencantumkan nilainya dengan bervariasi, ada yang menggunakan nilai perolehan tanpa dikurangi penyusutan, ada yang menggunakan nilai pasar, dan ada juga melakukan penyusutan dengan tarif perkiraan. Contohnya Koperasi Karyawan Suka IBA melakukan penyusutan dengan tarif 10%.

Pada sisi kanan mereka membuat lawan transaksi bervariasi. Ada yang hanya menyajikan hutang saja yaitu kopkar Suka IBA, kopkar Darma Karya, kopkar Berkah dan kopkar Swamitra. Namun ada juga yang menyajikan jumlah hutang dan modal. Walaupun nilai yang dicantumkan disana hanyalah nilai penyeimbang. Sama juga dengan akun ekuitas, koperasi keseluruhan juga mencatatkan isi ekuitas berupa simpanan pokok, simpanan sukarela, akan tetapi jumlah sisa hasil usaha yang belum terdistribusi tidak dicatat pada akun ekuitasnya, termasuk utang dari distribusi

sisa hasil usaha yang belum dibagikan. Hanya 3 koperasi yang cukup menerapkan akan tetapi hanya mencantumkan utang dari pembagian sisa hasil usaha. Laporan keuangan berupa laporan sisa hasil usaha dinilai peneliti diterapkan dengan baik, karena semua koperasi yang dinilai mempunyai laporan sisa hasil usaha. Untuk akun pendapatan tidak semua koperasi berpedoman kepada SAK ETAP, karena pendapatan berupa bunga bank tidak dimasukkan dalam pendapatan maupun pendapatan lain-lain padahal mereka memiliki rekening bank.

Beban operasional non-operasional seperti biaya penyusutan dinilai ada yang kurang dan tidak diterapkan, ini dikarenakan biaya penyusutan terhadap aktiva tidak tercantum pada laporan sisa hasil usaha serta tercantum tetapi tidak sesuai dengan perubahan nilai akumulasi di neraca. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas tidak dan kurang diterapkan. Ini dikarenakan investasi yang dilakukan tidak dicatat laba ruginya, serta tidak semua melakukan investasi dari sisa hasil usaha yang mereka peroleh. Laporan keuangan lainnya seperti laporan arus kas dan laporan perubahan modal, koperasi-koperasi tersebut tidak melaksanakannya. Hanya 3 koperasi saja yang membuat laporan itu. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan mereka untuk menyusun laporan tersebut dan ada juga koperasi yang menganggap laporan tersebut tidak ada gunanya.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat dilihat bahwa koperasi-koperasi tersebut dalam penyajian laporan keuangan masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan kaidah penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP. Dalam penyajian laporan keuangan, mereka belum familiar dengan SAK ETAP itu sendiri. Pedoman yang mereka gunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah petunjuk pelaksanaan (juklak), sistem dan prosedur (sisdur) yang terdapat dalam koperasi tersebut.

Bentuk penyajian penyajian laporan keuangan sebagian dari koperasi telah menyajikan laporan keuangan perbandingan dengan tahun sebelumnya, sebagian telah secara konsisten menyajikan laporan keuangan tiap periode. Hal ini menunjukkan perlunya langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi SAK ETAP (seperti pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP) sebagai upaya untuk penyajian laporan keuangan koperasi yang komparabel dan dapat diandalkan.

Analisis Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan SAK ETAP

Kebanyakan dari pengurus koperasi sudah mengetahui komponen-komponen laporan keuangan, namun dalam kegiatan usahanya sehari-hari sedikit sekali yang melakukan pencatatan hingga membuat laporan keuangan. Ini di karenakan:

1. Kurangnya kemampuan untuk menjalankan siklus akuntansi
2. Kurangnya sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang pekerjaannya
3. Kurangnya peran serta dari Kementrian Koperasi dan UMKM serta Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang dalam mensosialisaikan secara langsung serta melakukan pelatihan kepada pelaku usaha agar dapat memahami dan mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) terhadap usaha yang dijalankannya.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAK-ETAP belum diterapkan secara penuh dalam penyusunan laporan keuangan. Dari 33 koperasi yang menjadi objek penelitian hanya 3 koperasi yang membuat laporan keuangan secara utuh yaitu terdiri dari neraca, laporan sisa hasil usaha, perubahan ekuitas, arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Sementara 30 koperasi yang lainnya tidak membuat laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Neraca dan laporan sisa hasil usaha telah dibuat oleh seluruh koperasi yang menjadi sampel penelitian ini, akan tetapi kualitas laporan dilihat dari tiap-tiap akun masih belum sesuai dengan standar. Catatan atas laporan keuangan juga hampir tidak ada yang melaporkan. Sebagian dari koperasi telah menyajikan laporan keuangan perbandingan dengan tahun sebelumnya, sebagian telah secara konsisten menyajikan laporan keuangan tiap periode. Hal ini menunjukkan bahwa SAK ETAP belum terimplementasi

KETERBATASAN DAN FUTURE RESEARCH

Ketidaksihinggaan yang terjadi di lapangan disebabkan oleh lemahnya kualitas SDM untuk menerapkan SAK ETAP, yang berakibat pada ketidak wajarannya dalam pelaporan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang disusun koperasi karyawan belum memenuhi SAK ETAP.

Saran untuk penelitian lanjutan adalah terkait mengenai upaya memastikan koperasi karyawan yang ada di Kota Palembang dapat menyajikan laporan keuangannya berdasarkan SAK ETAP. Hal ini tentunya dapat membantu pengurus koperasi itu sendiri dalam pengambilan keputusan, memberikan informasi yang dapat dibandingkan, memberikan informasi yang mampu memprediksi di masa yang akan datang, sehingga koperasi tersebut dapat tertib, akurat, akuntabel dan transparan. Koperasi harus lebih aktif mengikuti pelatihan-pelatihan akuntansi agar dapat menyusun sendiri laporan keuangannya.

REFERENSI

Bernardi, Sutrisno, Asih. 2009. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan, dan Implikasinya terhadap Asimetri Informasi*, Jurnal Riset Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal

Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009*. Jakarta: IAI.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: IAI

Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27*. Jakarta: Salemba Empat

Jensen, M.C., dan Meckling, W.H. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost & Ownership Structure*. Journal of Financial Economics, 3, 308.

Kasmir. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi*. Edisi Kedua, Jakarta: Erlangga

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Pusat Bahasa Depdiknas.

Surya, Raja Adri Setiawan. 2012. *Akuntansi Keuangan Versi IFRS*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. 2012. Jakarta: Departemen Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.

Veronica S., dkk, 2011. *Kualitas Laporan Keuangan Umkm Serta Prospek Implementasi SAK ETAP*, Jurnal SNA XIV di Aceh.

<http://kementeriankoperasi.com/koperasi-karyawan/>, diakses pada tanggal 04 Agustus 2016.

<http://nik.depkop.go.id/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2016

TENTANG PENULIS

<p>Efva Octavina Donata Gozali adalah dosen pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya. Efva meraih gelar Magister Ilmu Ekonomi dari Universitas Sriwijaya. Aktif sebagai anggota di Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Efva tertarik dalam menulis tentang penelitian ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan masyarakat di Palembang ini dengan SAK ETAP, dimana SAK ETAP ini sangat membantu dalam penyusunan laporan keuangan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (perusahaan seperti UMKM), sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini di Palembang dapat membuat banyak pihak ingin mengenal SAK ETAP. Melalui penelitian ini juga peneliti secara langsung dapat mensosialisasikan keberadaan SAK ETAP ini bagi masyarakat UMKM. Email: efvagozali@unsri.ac.id</p>	<p>Nilam Kesuma merupakan dosen aktif di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya. Menyelesaikan gelar Magister Ilmu Ekonomi di Universitas Sriwijaya. Nilam aktif dalam penyusunan laporan keuangan bagi UMKM. Karenanya peneliti berniat untuk meneliti tentang penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP bagi masyarakat UMKM dikarenakan masih banyak masyarakat yang menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan standar yang ada karena minimnya pengetahuan masyarakat tersebut tentang standar akuntansi. Email: nice_palembang@yahoo.co.id</p>
---	--